PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 KEPADA SEMBILAN PEMERINTAH DAERAH

Pontianak, Selasa (6 Juni 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 6 Juni 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada sembilan entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, kepada Ketua DPRD atau yang mewakili dan Kepala Daerah atau yang mewakili bertempat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Dalam sambutannya kepala perwakilan menyampaikan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap sembilan entitas, terdapat tujuh entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan dua entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketujuh entitas tersebut adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mempawah. Opini tahun lalu Kabupaten Mempawah adalah WDP, namun seiring dengan berbagai upaya dan perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, pada tahun ini BPK dapat memberikan opini WTP. Sedangkan dua entitas lain opininya masih tetap masih WDP yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Sambas. Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemda yang memperoleh opini WTP.

Pencapaian opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Pengelolaan aset di beberapa pemda yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran, walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materalitas yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan entitas yang mendapatkan opini WDP. Permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah masalah pengelolaan aset daerah yang belum memadai, antara lain aset tetap yang masih belum ada nilai perolehannya, aset yang pencatatannya digabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset, di lain pihak masih juga ada pencatatan aset terutama dari hasil rehab atas aset, yang pencatatannya dipisahkan dari aset perolehan awalnya. Pada beberapa entitas masih ditemukan permasalahan aset yang tidak dapat diketahui dan ditelusuri keberadaannya dan aset-aset yang rusak masih tercatat dalam daftar aset tetap, serta ada juga hasil pengadaan aset yang bersumber dari berbagai jenis bantuan seperti BOS yang belum dicatat.

Redaksi . . .

Pengarah: Ida Sundari, **Penanggung Jawab:** Aan Hayatullah **Pemimpin Redaksi:** Wizar Dien Yatim, **Anggota:** Maya Syafira, Wahid Rakhmanto,M Septian Wicaksono, Gabriella Simarmata, Upik Maharani, Kusbianto,

Alamat Redaksi: Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Telepon: 0561 585349, Fax: 0561 713598, Website: http://pontianak.bpk.go.id.
Redaksi menerima tulisan dan foto dari pembaca. Kirim karya anda ke Redaksi Kabar Kalbar melalui email: bpkpontianak@gmail.com

KABAR ALBAR
MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Edisi VI | Juni | 2017

Dari Redaksi

Memasuki akhir semester pertama BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat disibukkan berbagai kegiatan yang ada diantaranya adalah Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kaliamantan Barat yang laporan nya diserahkan kepada entitas pada tanggal 6 Juni 2017 kepada sembilan entitas dan 12 Juni kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu juga pada bulan Juni 2017 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Biro SDM menyelenggarakan *Knowladge Transfer Forum* (KTF) untuk Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Bulan Juni ini juga merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim yg ada diseluruh dunia tak terkecuali oleh pegawai BPK Perwkilan Provinsi Kalimantan Barat hal ini dikarenakan bertepatan dengan jatuhnya bulan suci ramadhan dimana bulan penuh rahmat. untuk mengisi Bulan Ramadhan mushola Al-Amin BPK Perwakilan Provinsi kalimantan Barat mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar seperti melaksanakan *takjil on the road*.

Daftar Isi

Halaman 1
Dari Redaksi
Penyerahan LHP LK kepada Provinsi Kalimantan Barat
Daftar Isi

Halaman 2
Upacara Hari Lahir Pancasila
KTF di Lingkungan BPK Kalbar

Halaman 3
Kegiatan Bulan Ramadhan
Media Visit

Halaman 4
Penyerahan LK sembilan Entitas

Berita Utama

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR TA 2016

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari, Senin 12 Juni 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negera VII Dr. Abdul Latief, S.E., M.M. di dampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, dalam Sidang Paripurna Istimewa bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 yang serahkan kepada Ketua DPRD, L Kebing dan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. LHP atas LKPD Tahun 2016 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2016, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya:

1. Pengelolaan Persediaan pada UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Belum Memadai; dan
2. Pengelolaan Aset Tetap Provinsi Kalimantan Barat Kurang Memadai;

Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan WTP yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BPK berharap pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mempertahankan dan meningkatkan beberapa indikator kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Barat seperti ratio IPM pada level yang lebih tinggi dari rata-rata nasional serta mampu meningkatkan lagi angka pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan tingkat pengangguran dibawah angka nasional. Karena pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat belum tercapai.

Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2017

Untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia pada hari ini Kamis 1 Juni 2017 bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara kali ini dipimpin oleh komandan upacara **Deddy Ardianto**, Kepala Subbag Hukum. Sedangkan inspektur upacara adalah Kepala Subauditorat Kalbar II, **Agvita Windiadi** yang mewakili Kepala Perwakilan yang sedang bertugas ke Jakarta. Tujuan upacara kali ini yaitu agar meneguhkan komitmen untuk lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilia-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Inspektur upacara menyampaikan sambutan Presiden Republik Indonesai, **Joko Widodo** untuk mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila.

Selain itu juga Presiden mengingatkan agar senantiasa waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang Anti Pancasila, Anti UUD 1945, Anti NKRI, Anti Bhineka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia.

Penyelenggaraan Knowledge Transfer Forum (KTF) di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kamis, 15 Juni 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Biro SDM BPK Pusat, menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan, **Ida Sundari** didampingi oleh Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja **Rio Tirta**. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan ucapan terima kasihnya atas terselenggaranya KTF tersebut dan berharap kepada para peserta untuk serius mengikuti dan memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber mengingat pentingnya ilmu yang akan disampaikan, sehingga dapat diimplementasikan pada waktu melakukan pemeriksaan. Sementara itu Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja berharap dalam KTF kali ini para peserta ikut berinteraksi dengan para pemberi materi sehingga kegiatan ini berjalan menarik dan dapat saling bertukar ilmu pengetahuan.

Sebagai Narasumber kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) ini adalah **Nurul Komalasari** pegawai pada BPK Perwakilan Sumatera Selatan Master of Accounting pada The Australian National University Australia yang memberikan pemahaman tentang Penerapan Hukum **Benford** sebagai Penilaian Risiko dan Penentuan Sampel pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan **Muhammad Hammam** pegawai pada Biro SDM Master of Administration pada University of Birmingham, Inggris yang memaparkan tentang Akuntansi Aset Tetap dan Penerapan **Capital Charging** pada Sektor Publik.

KTF ini diikuti oleh seluruh Pemeriksa yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Turut hadir juga pada acara ini yaitu Kepala Subauditorat Kalbar I, **Patrice Lumumba Sihombing,** Kepala Sekretariat Perwakilan, **Aan Hayatullah**, Kepala Subbagian SDM, **Ugi Surya Sugia,** dan Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, **Wizar Dien Yatim.**

KABAR ALBAR

Kegiatan Bulan Ramadan 1438 H di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka menambah dan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selama Bulan Ramadan 1438 Hijriah Mushalla Al-Amin seperti tahun-tahun sebelumnya selalu mengadakan beberapa kegiatan ibadah keagamaan baik itu pengajian alquran atau diisi oleh tauziyah keagamaan oleh para Ustadz di wilayah Kalimantan Barat.

Pengajian diselenggarakan setiap empat kali dalam satu minggu, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis yang berlangsung selama satu jam setelah selesai ibadah Shalat Dzuhur selama bulan Ramadhan 1437 Hijriah ini menghadirkan penceramah dari masjid di lingkungan Kota Pontianak. Selain meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, juga sebagai sarana silaturahmi sesama umat dalam pergaulan sehari-hari dan yang utama demi kemakmuran Mushalla Al-Amin.

Selain itu juga pengurus Musholla Al-Amin mengadakan Takjil on The Road kegiatan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2017 bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan utama dari pada kegiatan ini adalah untuk saling berbagi kepada masyarakat khususnya kepada muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa dan sedang dalam perjalanan.

Kegiatan bulan Ramadhan 1438 H yang berlangsung di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ditutup dengan acara Buka Bersama keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini dlaksanakan pada tanggal 16 jun 2017 bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini di hadiri Kepala Perwakilan, **Ida Sundari** dan seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan menghadirkan Ustadz **Syahroni**

Kepala Perwakilan Melakukan Media Visit ke Kantor Pontianak Post dan TVRI Kalimantan Barat

Senin, 12 Juni 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan media visit ke media lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak Post dan TVRI Media visit tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan, **Ida Sundari** di dampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, **Aan Hayatullah**, Kepala Subaud Kalbar II, **Agvita Windiadi** dan Kepala Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan, **Wizar Dien Yatim** serta beberapa staf Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Kunjungan pertama yaitu Pontianak Post yang diterima langsung oleh Wakil Direktur Pontianak Post, **Salman Busrah**, serta beberapa pimpinan, reporter dan fotografer dari Pontianak Post Group, kunjungan berlangsung santai di ruang rapat redaksi Lt. 5 Gedung Graha Pena Jl. Gajah Mada.

Kemudian acara dilanjutkan dengan mengunjungi TVRI Stasiun Pontianak. Di TVRI Kepala Perwakilan melakukan dialog terbuka secara live selama satu jam dengan mengupas masalah opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016.

Tujuan dari pada media visit kali ini adalah bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ingin menjalin kerjasama dan mempererat silaturahmi dengan media lokal terutama Pontianak Post dan TVRI dan dapat terus menjaga dan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini.